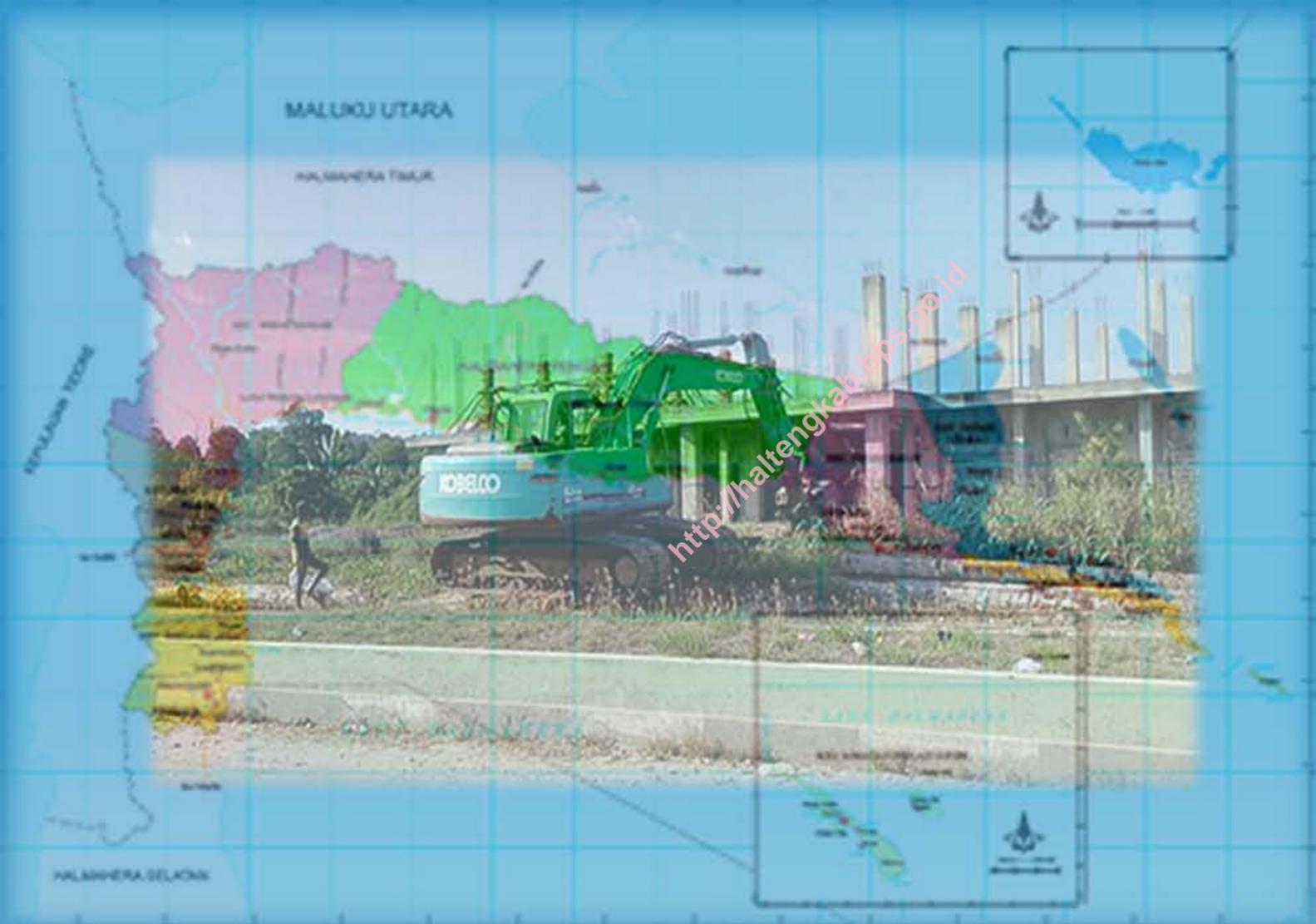


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2014



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2014

<http://haltengkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik – Kabupaten Halmahera Tengah

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Kabupaten Halmahera Tengah 2014

Katalog BPS	:	7102025.8202
Ukuran Buku	:	21,59 x 33 cm
Jumlah Halaman	:	v + 58
Naskah	:	BPS Kabupaten Halmahera Tengah
Penyunting	:	BPS Kabupaten Halmahera Tengah
Grafik	:	BPS Kabupaten Halmahera Tengah
Gambar Kulit	:	BPS Kabupaten Halmahera Tengah
Diterbitkan Oleh	:	BPS Kabupaten Halmahera Tengah
Dicetak Oleh	:	Toko Embong Jaya

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA SAMBUTAN

Pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan memerlukan data cukup banyak dan beragam. Dalam suatu proses perencanaan yang baik, evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai sangat diperlukan untuk merancang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ke depan.

Bagi suatu wilayah seperti Kabupaten Halmahera Tengah yang mempunyai wilayah ibukota baru, dalam proses pembenahan dan penyediaan infrastruktur dibutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu komponen yang cukup berperan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana pembangunan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah atas upayanya menyelesaikan buku ini. Kepada para sumber data seperti Dinas Pekerjaan Umum, Kontraktor, dan lainnya agar terus memberikan dukungan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Weda, September 2015
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Halmahera Tengah

.....

KATA PENGANTAR

Kebijakan Otonomi Daerah (Otodas) yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan melakukan pembangunan secara merata dan adil agar tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah antara lain adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB) khusus bahan bangunan/konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. IKK sangat ringkas, namun data ini dapat menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di kabupaten/kota masing-masing.

Weda, September 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Halmahera Tengah

Oki Afrizal, S.ST
NIP 19801002 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
II. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	
2.1 Konsep Pemikiran	4
2.2 Metode Penghitungan IKK	6
2.3 Perbandingan Dengan IKK 2014	8
2.4 Penghitungan Diagram Timbang IKK	9
III. ANALISIS IKK	
3.1 Profil Kabupaten Halmahera Tengah	26
3.2 IKK Kabupaten Halmahera Tengah	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Nama Desa yang Terdapat di Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014	29
Tabel 2. IKK Kabupaten/Kota yang Ada di Sekitar Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014	32
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2014	36
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2014	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Kabupaten Halmahera Tengah	27
Gambar 2. Peta Provinsi Maluku Utara	34

<http://haltengkab.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otonomi Daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrument transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemerataan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Luas Wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2014 adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kesulitan geografis menyediakan data dasar dalam

rangka kebijakan dana perimbangan 2015 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Umum untuk pengalokasian 2015.

<http://haltengkab.bps.go.id>

II. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

2.1 Konsep Pemikiran

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis, karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metoda penghitungan, yaitu pertama dengan pendekatan input, dan kedua dengan

pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead cost. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada pendekatan output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk manajemen cost dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup overhead cost dan produktivitas pekerja tanpa memasukan manajemen cost dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input tetapi dibawah harga output karena sudah

memasukkan overhead cost dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen Bill of Quantity (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

2.2 Metode Penghitungan IKK

Misalkan p_{kn} adalah harga komponen konstruksi n di kabupaten k ($k= 1, 2, \dots, K$; $n= 1, 2, \dots, N$). Maka model statistik metoda Country Product Dummy (CPD) dituliskan sebagai

$$p_{kn} = a_k b_n u_{kn}, \text{ dalam hal ini } k= 1, 2, \dots, K ; n= 1, 2, \dots, N,$$

a_k dan b_n merupakan parameter yang akan diduga dari data harga sedangkan u_{kn} merupakan random variabel yang berdistribusi identik dan independen. Dengan asumsi bahwa random variabel ini berdistribusi lognormal atau dengan kata

lain $\log p_{kn}$ berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian σ^2 , dalam bentuk logaritma model di atas berbentuk linier

$$\begin{aligned} \ln p_{kn} &= \ln a_k + \ln b_n + \ln u_{kn} \\ &= \alpha_k + \gamma_n + v_{kn} \end{aligned}$$

Parameter a_k diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di kabupaten k relatif terhadap harga konstruksi di kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila a_k dinyatakan sebagai relatif harga konstruksi terhadap kabupaten yang dijadikan referensi, katakan Kabupaten X, maka a_k adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), yaitu harga di Kabupaten X. Dengan kata lain harga konstruksi di kabupaten K 'setinggi' a_k dibanding harga konstruksi di Kabupaten X. Karenanya IKK di Kabupaten K dinyatakan sebagai $IKK_k = \exp(\alpha_k)$. Persamaan di atas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen.

Pada penghitungan IKK tahun 2014 ini Kota Surabaya dijadikan kota referensi dengan maksud supaya ada keterbandingan dengan IKK tahun sebelumnya. Untuk IKK tingkat provinsi data harga yang digunakan adalah rata-rata geometrik setiap komoditi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di

Provinsi masing-masing dengan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi referensinya.

2.3 Perbandingan Dengan IKK 2014

Sebagaimana diketahui bahwa IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, IKK tahun 2014 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date*

dengan menggunakan BoQ tahun 2012 dan updating BoQ tahun 2013.

IKK tahun 2014 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah tenaga kerja yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu akhir Juli 2013, Akhir Oktober 2013, akhir Januari 2014, dan akhir April 2014. Periode-periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi, sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan 2 periode pencacahan.

2.4 Penghitungan Diagram Timbang IKK

Basket of Construction Component Approach (BOCC)

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selajutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* yaitu:

- a. Gedung Bangunan
- b. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- c. Bangunan Lainnya

Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan *drainase* irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan viaduk.

- b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.b.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
- a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, *drainase* jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
- a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.

- b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
- c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
- d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
- e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran *drainase* pada gedung.
- f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.

- h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi *prefab* dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Sistem Konstruksi

Sistem menurut konsep pendekatan BOCC adalah suatu kumpulan komponen dalam suatu proyek konstruksi yang bisa menjalankan suatu fungsi tertentu. Sistem adalah struktur dalam sebuah bangunan yang diklasifikasikan kembali kedalam

kumpulan komponen bertujuan untuk mendukung bangunan seperti pondasi, atap, eksterior dan interior, dan lainnya. Sistem konstruksi pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan lainnya. Berikut adalah jenis sistem untuk bangunan rumah dan gedung, dan sistem untuk klasifikasi jenis bangunan lainnya.

Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

- *Site-work* (persiapan) adalah sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
- *Substructure* adalah sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban bagian bangunan yang berada di atasnya seperti balok, atap dan lainnya.
- *Superstructure* adalah Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian bangunan di atasnya.
- *Exterior Shell/Building Envelope* adalah Sistem yang berisi komponen konstruksi yang menyelimuti bangunan (atap).

Bangunan ini memberi beban pada system superstructure pada bangunan.

- *Interior Partitions* adalah Sistem yang terdiri dari semua dinding, dan bagian bangunan untuk jalan keluar masuk bangunan.
- *Interior and Exterior Finishes* adalah Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang bertujuan untuk memperindah bangunan, misalnya pengecatan.
- *Mechanical and Plumbing* adalah Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang mengatur suhu, saluran air, komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan lainnya.
- *Electrical* adalah Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang berhubungan dengan distribusi listrik dalam sebuah bangunan.

Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Lainnya

- *Site-work* (persiapan) adalah Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.

- *Substructure* adalah Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban dari struktur/ bagian bangunan yang berada di atasnya.
- *Superstructure* adalah Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian bangunan di atasnya.
- *Mechanical Equipment* adalah Perlengkapan mekanik yang dipasang pada suatu bangunan seperti pompa, turbin, pipa penghubung, tower pendingin, dan lainnya.
- *Electrical Equipment* adalah Peralatan yang terpasang pada bangunan yang digunakan untuk sistem distribusi tenaga listrik, distribusi panel, pusat kontrol pencahayaan, komunikasi dan lainnya.
- *Underground Utility* adalah Jaringan bawah tanah, sistem atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, transmisi dan distribusi komunikasi atau telekomunikasi, listrik, gas, minyak bumi, saluran pembuangan akhir, dan lainnya. Peralatan ini termasuk pipa,

kabel, fiber optic cable, dan lainnya yang terpasang dibawah permukaan tanah.

Komponen Konstruksi

- Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasi secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan.

Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item pekerjaan konstruksi yang

meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut.

Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK 2013 berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal) dan bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, bangunan umum untuk jatingan air listrik, dan komunikasi) bangunan 3 (bangunan lainnya).

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang, yaitu:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level system konstruksi

3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

Prosedur Penghitungan Penimbang

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK tahun 2012. BoQ yang dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2012 di kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika tidak ada pembangunan selama tahun 2012 maka bisa digantikan dengan BoQ dari pembangunan pada tahun 2011. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan.
- b. Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.
- c. Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.

2. Menghitung share nilai untuk masing-masing tahapan penimbang (W1, W2, dan W3) setiap kabupaten/kota.

- a. Menghitung penimbang W1 setiap kabupaten/kota
Pada tahapan penimbang W1 dihitung share nilai setiap sistem untuk masing-masing bangunan.
Nilai sistem adalah jumlah nilai dari seluruh bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan yang

digunakan dalam suatu sistem konstruksi. Penimbang W1 diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$W1_i = \frac{\text{Nilai Sistem}_i}{\sum_{i=1}^{n1} \text{Nilai Sistem}_i}$$

n1 = 1, 2, ..., 8 untuk bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal

n1 = 1, 2, ..., 6 untuk bangunan selainnya

b. Menghitung penimbang W2 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W2 dihitung share nilai setiap komponen untuk masing-masing sistem.

Nilai komponen adalah: jumlah nilai dari seluruh bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan yang digunakan dalam sebuah komponen konstruksi.

Penimbang W2 bisa diperoleh dengan rumus berikut:

$$W2_{ij} = W1_i \cdot \frac{\text{Nilai Komponen}_{ij}}{\sum_j^{n2} \text{Nilai Komponen}_{ij}}$$

n2 menunjukkan jumlah komponen dalam sistem yang bersangkutan.

- c. Menghitung *share* untuk penimbang W3 setiap kabupaten/kota.

Pada tahapan penimbang W3 dihitung *share* nilai setiap komoditi untuk masing-masing komponen. Penimbang W3 bisa diperoleh dengan rumus berikut:

$$W3_{ijk} = W2_{ij} \cdot \frac{\text{Nilai Komoditi}_{ijk}}{\sum_k^{n3} \text{Nilai Komoditi}_{ijk}}$$

n3 menunjukkan jumlah komoditi pada komponen yang bersangkutan. Dimana:

$$\sum_1^{n1} W_i = 1$$

$$\sum_i^{n1} \sum_j^{n2} W_{ij} = 1$$

$$\sum_i^{n1} \sum_j^{n2} \sum_k^{n3} W_{ijk} = 1$$

Selain sistem penimbang dengan menggunakan pendekatan BOCC, untuk menghitung IKK juga menggunakan penimbang umum (W0) yang digunakan sebagai penghubung masing-masing jenis bangunan menjadi suatu kesatuan konstruksi. Penimbang umum berasal dari realisasi anggaran daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk pembangunan konstruksi yang diperoleh melalui survei Keuangan Pemda Tingkat II (K-II) dari Subdirektorat Keuangan dan Teknologi Informasi dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari data realisasi anggaran daerah tingkat II untuk pembangunan masing-

masing jenis bangunan diperoleh bobot masing-masing jenis bangunan ke total konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

<http://haltengkab.bps.go.id>

III. ANALISIS IKK

3.1 Profil Kabupaten Halmahera Tengah

Kabupaten Halmahera Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang mempunyai ibukota di Weda. Secara geografis letak Kabupaten Halmahera Tengah di antara $0^{\circ}45'$ Lintang Utara – $0^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan $127^{\circ}45'$ – $129^{\circ}26'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah tercatat $8.381,48 \text{ km}^2$ dengan luas daratan sebesar $2.276,83 \text{ km}^2$ dan lautan sebesar $6.104,65 \text{ km}^2$. Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari 10 kecamatan, 63 desa.

Kabupaten Halmahera Tengah berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur di sebelah utara, Provinsi Papua Barat di sebelah timur, Kota Tidore Kepulauan di sebelah barat dan Kabupaten Halmahera Selatan di sebelah selatan. Selain itu, Halmahera Tengah berbatasan juga dengan Teluk Buli dan Teluk Weda yang menjadikan hasil perikanan sebagai kandungan alam potensial dan layak menjadi andalan.



Gambar 1. Peta Kabupaten Halmahera Tengah

Selain potensial dengan hasil perikanan, sejak tahun 2011 sudah ada tempat wisata *Weda Resort* yang terletak di Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah. Tempat wisata yang menawarkan *diving* dan *bird watching* sebagai produk andalannya ini sangat potensial untuk menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara sehingga bisa meningkatkan

sumbangan dari sektor pariwisata terhadap total kegiatan ekonomi di Halmahera Tengah.

Kabupaten Halmahera Tengah berdiri sejak tahun 1968 sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. Odes 25/I/8 tahun 1968 dengan maksud dikembangkan untuk dijadikan daerah tingkat II yang otonom. Kemudian direstui dengan Skep Mendagri tgl 15 April 1969 No. Pemda 2/I/33. Dengan demikian secara *de facto* sejak tahun 1969, Kabupaten Halmahera Tengah telah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sejajar dengan daerah tingkat II lainnya di Provinsi Maluku.

Pada tahun 1990 daerah Halmahera Tengah dinyatakan sebagai daerah Kabupaten penuh. Dengan menyesuaikan pada perkembangan waktu dan tuntutan kondisi sosial masyarakat, maka pada tahun 2003, dengan UU RI No. 1 tahun 2003 Kabupaten Halmahera Tengah dimekarkan menjadi tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Kabupaten Induk kemudian Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan.

Setelah pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2005, wilayah Kabupaten Halmahera Tengah menjadi 6 (enam) Kecamatan, yaitu: Weda, Weda Utara, Weda Selatan, Patani, Patani Utara, dan Pulau Gebe. Ibukota kabupaten dipindahkan ke salah satu kecamatan tersebut yang saat ini menjadi Kota Weda.

Perkembangan administrasi pemerintahan terus mengalami perkembangan untuk lebih mendekatkan masyarakat pada pelayanan publik. Adapun jumlah dan nama desa di setiap kecamatan berdasarkan kondisi sampai dengan tahun 2013 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1. Nama Desa yang Terdapat di Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014.

Kecamatan	Desa	
1. Weda	1. Nusliko 2. Were 3. Nurweda 4. Fidy Jaya	5. Sidanga 6. Wedana 7. Goeng
2. Weda Selatan	1. Kluting Jaya 2. Wairoro Indah 3. Tilope 4. Sosowomo	5. Loleo 6. Sumber Sari 7. Lembah Asri 8. Air Salobar

3. Weda Utara	1. Gemaf 2. Sagea 3. Fritu	4. Waleh 5. Kiya 6. UPT Waleh
4. Weda Tengah	1. Kobe 2. Sawai Itepo 3. Lelilef Waibulan 4. Lelilef Sawai	5. Woekop 6. Woejerana 7. Kulo Jaya
5. Weda Timur	1. Yeke 2. Messa	3. Dotte 4. Kotalo
6. Pulau Gebe	1. Umera 2. Sanafi 3. Kacepi 4. Kapaleo	5. Umiyal 6. Sanaf Kacepo 7. Elfanun 8. Yam
7. Patani	1. Yeisowo 2. Wailegi 3. Kipai	4. Yondeliu 5. Baka Jaya
8. Patani Utara	1. Gemia 2. Tepeleo 3. Bilifitu	4. Tepeleo Batu Dua 5. Pantura Jaya 6. Maliforo
9. Patani Barat	1. Bobane Indah 2. Banemo 3. Bobane Jaya	4. Moreala 5. Sibenpopo
10. Patani Timur	1. Peniti 2. Masure 3. Sakam	4. Pallo 5. Damuli 6. Nursifa

3.2 IKK Kabupaten Halmahera Tengah

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap tingkat kemahalan rata-rata nasional (IKK = 100).

Secara umum, nilai IKK di wilayah timur Indonesia lebih tinggi daripada nilai IKK di wilayah barat Indonesia. Keadaan geografis yang luas, akses antar wilayah yang sulit, dan sarana prasarana transportasi yang belum maksimal adalah beberapa faktor pendukung tingginya nilai IKK di wilayah tersebut.

IKK Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 menduduki peringkat ke-3 di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 117,89. IKK tertinggi pada level nasional adalah Provinsi Papua dengan nilai IKK sebesar 191,86 dan terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IKK sebesar 81,00.

IKK Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2014 adalah 136,09. Kabupaten Halmahera Tengah menempati urutan kedua pada level provinsi. IKK terendah pada level provinsi adalah Kabupaten Halmahera Selatan (92,32). Pada level nasional, IKK tertinggi adalah Kabupaten Puncak dengan nilai sebesar 462,84 dan terendah adalah Kabupaten Lombok Utara dengan nilai sebesar 71,64.

Berikut IKK Kabupaten Halmahera Tengah dan sekitarnya:

Tabel 2. IKK Kabupaten/Kota yang Ada di Sekitar Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014

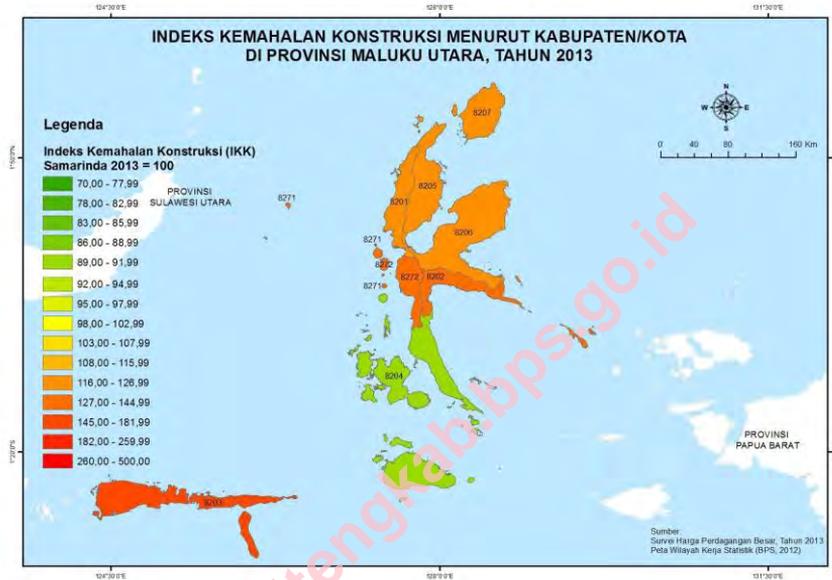
Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	IKK Tahun 2013
8202	HALMAHERA TENGAH	136,09
8272	TIDORE KEPULAUAN	131,61
8206	HALMAHERA TIMUR	119,28
8271	KOTA TERNATE	126,94
8204	HALMAHERA SELATAN	92,32

Secara umum pada tahun 2014, IKK Kabupaten Halmahera Tengah yakni sebesar 136,09 paling tinggi dibandingkan dengan IKK di kabupaten sekitar Halmahera Tengah. Secara implisit hal ini menggambarkan bahwa secara umum harga barang-barang konstruksi yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di Kabupaten Halmahera Tengah paling tinggi apabila

dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini tentunya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, bagi usaha sektor perdagangan bahan konstruksi serta bagi pelaku usaha sektor konstruksi di Kabupaten Halmahera Tengah.

Banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dan jasa di suatu wilayah. Selain sisi permintaan dan penawaran, juga terdapat faktor lain seperti jumlah pedagang besar di suatu kota, kondisi jalan yang mempengaruhi jalur distribusi, jarak ke tempat asal barang, dan lain-lain.

Paket komoditas dapat dikategorikan menjadi barang alam/natural dan barang pabrikan. Dilihat dari harga rata-rata Provinsi Maluku Utara harga barang natural seperti pasir, batu, papan, balok, dan batu split Kabupaten Halmahera Tengah relatif murah sedangkan untuk barang pabrikan seperti tripleks, cat, aspal, kaca, dan sebagainya relatif mahal. Barang pabrikan relatif mahal karena berasal dari luar Maluku Utara, yaitu Surabaya, Manado, dan Makassar.



Gambar 2. Peta Provinsi Maluku Utara

Dari perbandingan harga, letak geografis, dan sarana pelabuhan di kabupaten/kota tersebut, dapat dijelaskan asal barang pabrikan diperoleh sebagai berikut:

- i. Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan sebagian besar bahan bangunan/konstruksi dari Ternate melalui jalur laut menuju Sofifi dan dilanjutkan melalui jalur darat menuju ibukota Halmahera Tengah di Weda. Selain dari Ternate, sebagian bahan bangunan/konstruksi berasal dari Tobelo melalui jalur darat.

- ii. Seperti Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan mendapatkan sebagian besar bahan/bangunan dari Kota Ternate melalui jalur laut.
- iii. Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan sebagian besar bahan bangunan/konstruksi dari Halmahera Utara melalui jalur laut.
- iv. Kota Ternate mendapatkan bahan bangunan/konstruksi dari Surabaya dan Makassar melalui jalur laut. Sebelum bahan bangunan/konstruksi masuk Kota Ternate, kapal barang terlebih dahulu singgah di Kabupaten Halmahera Selatan.

Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2014

NO	KODE	PROVINSI	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	ACEH	93.54
2	1200	SUMATERA UTARA	96.08
3	1300	SUMATERA BARAT	92.90
4	1400	R I A U	102.89
5	1500	J A M B I	94.90
6	1600	SUMATERA SELATAN	98.80
7	1700	BENGKULU	96.21
8	1800	LAMPUNG	91.87
9	1900	KEP. BANGKA BELITUNG	102.09
10	2100	KEPULAUAN RIAU	107.34
11	3100	DKI JAKARTA	97.13
12	3200	JAWA BARAT	88.05
13	3300	JAWA TENGAH	83.00
14	3400	DI YOGYAKARTA	84.81
15	3500	JAWA TIMUR	87.62
16	3600	BANTEN	89.19
17	5100	B A L I	91.67
18	5200	NUSA TENGGARA BARAT	81.00
19	5300	NUSA TENGGARA TIMUR	89.31
20	6100	KALIMANTAN BARAT	109.46
21	6200	KALIMANTAN TENGAH	103.23

Tabel 3. (Lanjutan)

NO	KODE	PROVINSI	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
22	6300	KALIMANTAN SELATAN	99.18
23	6400	KALIMANTAN TIMUR	100.00
24	6500	KALIMANTAN UTARA	109.86
25	7100	SULAWESI UTARA	102.10
26	7200	SULAWESI TENGAH	86.62
27	7300	SULAWESI SELATAN	88.55
28	7400	SULAWESI TENGGARA	99.67
29	7500	GORONTALO	93.62
30	7600	SULAWESI BARAT	94.79
31	8100	MALUKU	104.43
32	8200	MALUKU UTARA	117.89
33	9100	PAPUA BARAT	125.79
34	9400	PAPUA	191.86

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2014

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1100	NANGROE ACEH DARUSSALAM	
1101	KAB SIMEULUE	112.83
1102	KAB ACEH SINGKIL	106.38
1103	KAB ACEH SELATAN	89.93
1104	KAB ACEH TENGGARA	91.98
1105	KAB ACEH TIMUR	101.12
1106	KAB ACEH TENGAH	103.33
1107	KAB ACEH BARAT	100.28
1108	KAB ACEH BESAR	91.00
1109	KAB PIDIE	92.18
1110	KAB BIREUEN	101.25
1111	KAB ACEH UTARA	108.34
1112	KAB ACEH BARAT DAYA	96.46
1113	KAB GAYO LUES	89.12
1114	KAB ACEH TAMIANG	96.75
1115	KAB NAGAN RAYA	119.46
1116	KAB ACEH JAYA	98.82
1117	KAB BENER MERIAH	99.66
1118	KAB PIDIE JAYA	93.21
1171	KOTA BANDA ACEH	102.26
1172	KOTA SABANG	99.30
1173	KOTA LANGSA	93.06
1174	KOTA LHOKEUMAWE	105.71
1175	KOTA SUBULUSSALAM	75.83
1200	SUMATERA UTARA	
1201	KAB NIAS	89.54

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1202	KAB MANDAILING NATAL	101.02
1203	KAB TAPANULI SELATAN	111.97
1204	KAB TAPANULI TENGAH	87.30
1205	KAB TAPANULI UTARA	101.53
1206	KAB TOBA SAMOSIR	114.86
1207	KAB LABUHAN BATU	89.73
1208	KAB ASAHAN	100.54
1209	KAB SIMALUNGUN	91.34
1210	KAB DAIRI	80.47
1211	KAB KARO	95.36
1212	KAB DELI SERDANG	103.36
1213	KAB LANGKAT	82.90
1214	KAB NIAS SELATAN	107.24
1215	KAB HUMBANG HASUNDUTAN	107.86
1216	KAB PAKPAK BHARAT	112.23
1217	KAB SAMOSIR	122.79
1218	KAB SERDANG BEDAGAI	99.28
1219	KAB BATU BARA	100.85
1220	KAB PADANG LAWAS UTARA	81.16
1221	KAB PADANG LAWAS	80.99
1222	KAB LABUHAN BATU SELATAN	116.96
1223	KAB LABUHAN BATU UTARA	98.72
1224	KAB NIAS UTARA	113.49
1225	KAB NIAS BARAT	98.35
1271	KOTA SIBOLGA	103.63
1272	KOTA TANJUNGBALAI	102.22
1273	KOTA PEMATANG SIANTAR	89.50
1274	KOTA TEBING TINGGI	97.22
1275	KOTA MEDAN	87.26

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1276	KOTA BINJAI	100.17
1277	KOTA PADANGSIDIMPUAN	109.99
1278	KOTA GUNUNG SITOLI	99.79
1300	SUMATERA BARAT	
1301	KAB KEPULAUAN MENTAWAI	181.95
1302	KAB PESISIR SELATAN	95.86
1303	KAB SOLOK	92.31
1304	KAB SWL/SIJUNJUNG	101.48
1305	KAB TANAH DATAR	95.30
1306	KAB PADANG PARIAMAN	100.40
1307	KAB AGAM	99.60
1308	KAB LIMA PULUH KOTA	98.96
1309	KAB PASAMAN	96.07
1310	KAB SOLOK SELATAN	95.25
1311	KAB DHARMASRAYA	96.78
1312	KAB PASAMAN BARAT	99.08
1371	KOTA PADANG	100.68
1372	KOTA SOLOK	96.45
1373	KOTA SAWAH LUNTO	91.55
1374	KOTA PADANG PANJANG	97.16
1375	KOTA BUKITTINGGI	99.05
1376	KOTA PAYAKUMBUH	99.08
1377	KOTA PARIAMAN	89.96
1400	RIAU	
1401	KAB KUANTAN SINGINGI	96.00

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1402	KAB INDRAGIRI HULU	106.77
1403	KAB INDRAGIRI HILIR	106.62
1404	KAB PELALAWAN	101.76
1405	KAB SIAK	116.54
1406	KAB KAMPAR	99.44
1407	KAB ROKAN HULU	99.41
1408	KAB BENGKALIS	125.07
1409	KAB ROKAN HILIR	118.35
1410	KAB KEPULAUAN MERANTI	123.09
1471	KOTA PEKANBARU	109.63
1472	KOTA DUMAI	98.82
1500	JAMBI	
1501	KAB KERINCI	94.02
1502	KAB MERANGIN	90.86
1503	KAB SAROLANGUN	96.05
1504	KAB BATANG HARI	89.78
1505	KAB MUARO JAMBI	84.71
1506	KAB TANJUNG JABUNG TIMUR	98.88
1507	KAB TANJUNG JABUNG BARAT	118.56
1508	KAB TEBO	92.79
1509	KAB BUNGO	97.64
1571	KOTA JAMBI	98.95
1572	KOTA SUNGAI PENUH	89.03
1600	SUMATERA SELATAN	
1601	KAB OGAN KOMERING ULU	95.07

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1602	KAB OGAN KOMERING ILIR	98.19
1603	KAB MUARA ENIM	100.11
1604	KAB LAHAT	97.93
1605	KAB MUSI RAWAS	108.33
1606	KAB MUSI BANYUASIN	113.29
1607	KAB BANYU ASIN	107.21
1608	KAB OKU SELATAN	94.55
1609	KAB OKU TIMUR	93.68
1610	KAB OGAN ILIR	107.79
1611	KAB EMPAT LAWANG	103.80
1671	KOTA PALEMBANG	104.34
1672	KOTA PRABUMULIH	105.62
1673	KOTA PAGAR ALAM	109.26
1674	KOTA LUBUK LINGGAU	99.73
1700	BENGGULU	
1701	KAB BENGKULU SELATAN	97.89
1702	KAB REJANG LEBONG	94.64
1703	KAB BENGKULU UTARA	96.76
1704	KAB KAUR	103.32
1705	KAB SELUMA	102.14
1706	KAB MUKOMUKO	112.53
1707	KAB LEBONG	98.58
1708	KAB KEPAHANG	103.55
1709	KAB BENGKULU TENGAH	102.43
1771	KOTA BENGKULU	99.45

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1800	LAMPUNG	
1801	KAB LAMPUNG BARAT	104.51
1802	KAB TANGGAMUS	97.10
1803	KAB LAMPUNG SELATAN	94.57
1804	KAB LAMPUNG TIMUR	93.84
1805	KAB LAMPUNG TENGAH	93.56
1806	KAB LAMPUNG UTARA	90.50
1807	KAB WAY KANAN	95.61
1808	KAB TULANG BAWANG	98.64
1809	KAB PESAWARAN	91.62
1810	KAB PRINGSEWU	87.68
1811	KAB MESUJI	114.66
1812	KAB TULANG BAWANG BARAT	105.94
1813	KAB PESISIR BARAT	88.84
1871	KOTA BANDAR LAMPUNG	98.71
1872	KOTA METRO	94.65
1900	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
1901	KAB BANGKA	103.16
1902	KAB BELITUNG	109.10
1903	KAB BANGKA BARAT	109.26
1904	KAB BANGKA TENGAH	108.47
1905	KAB BANGKA SELATAN	110.43
1906	KAB BELITUNG TIMUR	107.19
1971	KOTA PANGKAL PINANG	103.00

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
2100	KEPULAUAN RIAU	
2101	KAB KARIMUN	94.81
2102	KAB BINTAN	103.00
2103	KAB NATUNA	129.27
2104	KAB LINGGA	112.54
2105	KAB KEP. ANAMBAS	142.00
2171	KOTA BATAM	110.46
2172	KOTA TANJUNG PINANG	97.13
3200	JAWA BARAT	
3201	KAB BOGOR	103.85
3202	KAB SUKABUMI	90.37
3203	KAB CIANJUR	75.60
3204	KAB BANDUNG	111.41
3205	KAB GARUT	86.10
3206	KAB TASIKMALAYA	92.15
3207	KAB CIAMIS	97.12
3208	KAB KUNINGAN	88.43
3209	KAB CIREBON	88.14
3210	KAB MAJALENGKA	84.24
3211	KAB SUMEDANG	87.31
3212	KAB INDRAMAYU	92.36
3213	KAB SUBANG	93.52
3214	KAB PURWAKARTA	86.97
3215	KAB KARAWANG	100.79
3216	KAB BEKASI	105.79
3217	KAB BANDUNG BARAT	90.30

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
3218	KAB PANGANDARAN	105.46
3271	KOTA BOGOR	93.99
3272	KOTA SUKABUMI	84.63
3273	KOTA BANDUNG	91.99
3274	KOTA CIREBON	89.78
3275	KOTA BEKASI	101.67
3276	KOTA DEPOK	100.02
3277	KOTA CIMAHI	87.72
3278	KOTA TASIKMALAYA	87.21
3279	KOTA BANJAR	88.32
3300	JAWA TENGAH	
3301	KAB CILACAP	90.27
3302	KAB BANYUMAS	82.20
3303	KAB PURBALINGGA	78.16
3304	KAB BANJARNEGARA	83.35
3305	KAB KEBUMEN	84.78
3306	KAB PURWOREJO	84.83
3307	KAB WONOSOBO	87.74
3308	KAB MAGELANG	81.00
3309	KAB BOYOLALI	87.05
3310	KAB KLATEN	85.01
3311	KAB SUKOHARJO	88.50
3312	KAB WONOGIRI	83.83
3313	KAB KARANGANYAR	74.74
3314	KAB SRAGEN	92.62
3315	KAB GROBOGAN	91.76
3316	KAB BLORA	88.87

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
3317	KAB REMBANG	98.36
3318	KAB PATI	94.10
3319	KAB KUDUS	88.62
3320	KAB JEPARA	98.27
3321	KAB DEMAK	91.96
3322	KAB SEMARANG	91.74
3323	KAB TEMANGGUNG	88.18
3324	KAB KENDAL	85.92
3325	KAB BATANG	78.43
3326	KAB PEKALONGAN	90.02
3327	KAB PEMALANG	89.99
3328	KAB TEGAL	80.92
3329	KAB BREBES	91.17
3371	KOTA MAGELANG	88.37
3372	KOTA SURAKARTA	87.05
3373	KOTA SALATIGA	91.41
3374	KOTA SEMARANG	91.85
3375	KOTA PEKALONGAN	85.79
3376	KOTA TEGAL	79.11
3400	DI YOGYAKARTA	
3401	KAB KULON PROGO	81.23
3402	KAB BANTUL	84.67
3403	KAB GUNUNG KIDUL	88.42
3404	KAB SLEMAN	80.04
3471	KOTA YOGYAKARTA	84.79

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
3500	JAWA TIMUR	
3501	KAB PACITAN	74.69
3502	KAB PONOROGO	96.65
3503	KAB TRENGGALEK	96.06
3504	KAB TULUNGAGUNG	95.11
3505	KAB BLITAR	82.34
3506	KAB KEDIRI	94.47
3507	KAB MALANG	97.89
3508	KAB LUMAJANG	85.47
3509	KAB JEMBER	78.34
3510	KAB BANYUWANGI	74.45
3511	KAB BONDOWOSO	84.99
3512	KAB SITUBONDO	93.60
3513	KAB PROBOLINGGO	86.19
3514	KAB PASURUAN	79.49
3515	KAB SIDOARJO	91.60
3516	KAB MOJOKERTO	91.30
3517	KAB JOMBANG	99.16
3518	KAB NGANJUK	94.29
3519	KAB MADIUN	95.73
3520	KAB MAGETAN	98.91
3521	KAB NGAWI	98.71
3522	KAB BOJONEGORO	102.05
3523	KAB TUBAN	85.25
3524	KAB LAMONGAN	97.72
3525	KAB GRESIK	101.70
3526	KAB BANGKALAN	95.25
3527	KAB SAMPANG	95.41

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
3528	KAB PAMEKASAN	101.29
3529	KAB SUMENEP	96.83
3571	KOTA KEDIRI	100.28
3572	KOTA BLITAR	95.77
3573	KOTA MALANG	93.12
3574	KOTA PROBOLINGGO	87.66
3575	KOTA PASURUAN	84.87
3576	KOTA MOJOKERTO	95.49
3577	KOTA MADIUN	98.48
3578	KOTA SURABAYA	95.14
3579	KOTA BATU	92.10
3600	BANTEN	
3601	KAB PANDEGLANG	87.67
3602	KAB LEBAK	87.87
3603	KAB TANGERANG	93.64
3604	KAB SERANG	90.49
3671	KOTA TANGERANG	98.21
3672	KOTA CILEGON	98.42
3673	KOTA SERANG	92.66
3674	KOTA TANGERANG SELATAN	101.20
5100	BALI	
5101	KAB JEMBRANA	88.37
5102	KAB TABANAN	101.06
5103	KAB BADUNG	91.82
5104	KAB GIANYAR	81.63

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
5105	KAB KLUNGKUNG	83.30
5106	KAB BANGLI	87.26
5107	KAB KARANGASEM	87.75
5108	KAB BULELENG	98.86
5171	KOTA DENPASAR	96.16
5200	NUSA TENGGARA BARAT	
5201	KAB LOMBOK BARAT	80.51
5202	KAB LOMBOK TENGAH	80.87
5203	KAB LOMBOK TIMUR	92.62
5204	KAB SUMBAWA	79.17
5205	KAB DOMPU	83.92
5206	KAB BIMA	85.88
5207	KAB SUMBAWA BARAT	91.96
5208	KAB LOMBOK UTARA	71.64
5271	KOTA MATARAM	102.44
5272	KOTA BIMA	85.26
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	
5301	KAB SUMBA BARAT	91.86
5302	KAB SUMBA TIMUR	87.59
5303	KAB KUPANG	88.23
5304	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	87.92
5305	KAB TIMOR TENGAH UTARA	87.37
5306	KAB BELU	86.37
5307	KAB ALOR	102.21
5308	KAB LEMBATA	93.53

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
5309	KAB FLORES TIMUR	104.21
5310	KAB SIKKA	90.49
5311	KAB ENDE	84.62
5312	KAB NGADA	88.68
5313	KAB MANGGARAI	108.48
5314	KAB ROTE NDAO	93.95
5315	KAB MANGGARAI BARAT	97.24
5316	KAB SUMBA TENGAH	88.99
5317	KAB SUMBA BARAT DAYA	96.40
5318	KAB NAGEKEO	93.40
5319	KAB MANGGARAI TIMUR	83.32
5320	KAB SABU RAIJUA	119.80
5321	KAB MALAKA	90.22
5371	KOTA KUPANG	106.65
6100	KALIMANTAN BARAT	
6101	KAB SAMBAS	98.43
6102	KAB BENGKAYANG	106.71
6103	KAB LANDAK	105.54
6104	KAB PONTIANAK	99.89
6105	KAB SANGGAU	112.59
6106	KAB KETAPANG	166.78
6107	KAB SINTANG	129.52
6108	KAB KAPUAS HULU	124.66
6109	KAB SEKADAU	105.68
6110	KAB MELAWI	165.78
6111	KAB KAYONG UTARA	108.55
6112	KAB KUBU RAYA	132.17

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
6171	KOTA PONTIANAK	118.69
6172	KOTA SINGKAWANG	113.18
6200	KALIMANTAN TENGAH	
6201	KAB KOTAWARINGIN BARAT	102.63
6202	KAB KOTAWARINGIN TIMUR	112.10
6203	KAB KAPUAS	101.33
6204	KAB BARITO SELATAN	112.69
6205	KAB BARITO UTARA	105.23
6206	KAB SUKAMARA	132.47
6207	KAB LAMANDAU	106.48
6208	KAB SERUYAN	97.29
6209	KAB KATINGAN	106.83
6210	KAB PULANG PISAU	108.27
6211	KAB GUNUNG MAS	115.32
6212	KAB BARITO TIMUR	116.32
6213	KAB MURUNG RAYA	97.49
6271	KOTA PALANGKA RAYA	107.65
6300	KALIMANTAN SELATAN	
6301	KAB TANAH LAUT	98.07
6302	KAB KOTA BARU	108.05
6303	KAB BANJAR	94.71
6304	KAB BARITO KUALA	96.19
6305	KAB TAPIN	102.87
6306	KAB HULU SUNGAI SELATAN	100.50
6307	KAB HULU SUNGAI TENGAH	101.95

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
6308	KAB HULU SUNGAI UTARA	105.34
6309	KAB TABALONG	119.00
6310	KAB TANAH BUMBU	109.22
6311	KAB BALANGAN	111.51
6371	KOTA BANJARMASIN	109.16
6372	KOTA BANJAR BARU	99.85
6400	KALIMANTAN TIMUR	
6401	KAB PASER	99.94
6402	KAB KUTAI BARAT	113.75
6403	KAB KUTAI KARTANEGARA	135.09
6404	KAB KUTAI TIMUR	109.42
6405	KAB BERAU	103.48
6409	KAB PENAJAM PASER UTARA	103.43
6410	KAB MAHAKAM HULU	116.54
6471	KOTA BALIKPAPAN	118.61
6472	KOTA SAMARINDA	100.00
6474	KOTA BONTANG	114.62
6500	KALIMANTAN UTARA	
6501	KAB MALINAU	125.99
6502	KAB BULUNGAN	122.13
6503	KAB TANA TIDUNG	188.29
6504	KAB NUNUKAN	94.20
6571	KOTA TARAKAN	114.61

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
7100	SULAWESI UTARA	
7101	KAB BOLAANG MONGONDOW	108.98
7102	KAB MINAHASA	101.63
7103	KAB KEPULAUAN SANGIHE	131.74
7104	KAB KEPULAUAN TALAUD	133.39
7105	KAB MINAHASA SELATAN	106.48
7106	KAB MINAHASA UTARA	92.02
7107	KAB BOLAANG MONGONDOW UTARA	105.29
7108	KAB KEP. SIAU TAGOLANDANG BIARO (SITARO)	117.26
7109	KAB MINAHASA TENGGARA	110.78
7110	KAB BOLIMONG SELATAN	103.66
7111	KAB BOLIMONG TIMUR	112.72
7171	KOTA MANADO	103.34
7172	KOTA BITUNG	91.27
7173	KOTA TOMOHON	91.44
7174	KOTA KOTAMOBAGU	108.03
7200	SULAWESI TENGAH	
7201	KAB BANGGAI KEPULAUAN	96.31
7202	KAB BANGGAI	93.92
7203	KAB MOROWALI	96.49
7204	KAB POSO	91.17
7205	KAB DONGGALA	84.57
7206	KAB TOLI-TOLI	89.36
7207	KAB BUOL	87.57
7208	KAB PARIGI MOUTONG	91.25

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
7209	KAB TOJO UNA-UNA	101.32
7210	KAB SIGI	88.93
7271	KOTA PALU	90.76
7300	SULAWESI SELATAN	
7301	KAB SELAYAR	95.31
7302	KAB BULUKUMBA	101.22
7303	KAB BANTAENG	90.82
7304	KAB JENEPONTO	84.49
7305	KAB TAKALAR	94.38
7306	KAB GOWA	94.49
7307	KAB SINJAI	88.15
7308	KAB MAROS	94.64
7309	KAB PANGKAJENE KEPULAUAN	101.32
7310	KAB BARRU	99.70
7311	KAB BONE	98.40
7312	KAB SOPPENG	94.57
7313	KAB WAJO	95.20
7314	KAB SIDENRENG RAPPANG	86.93
7315	KAB PINRANG	85.68
7316	KAB ENREKANG	97.79
7317	KAB LUWU	102.63
7318	KAB TANA TORAJA	105.16
7322	KAB LUWU UTARA	92.58
7325	KAB LUWU TIMUR	99.40
7326	KAB TORAJA UTARA	104.55
7371	KOTA MAKASSAR	93.91
7372	KOTA PAREPARE	92.94
7373	KOTA PALOPO	87.30

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
7400	SULAWESI TENGGARA	
7401	KAB BUTON	121.19
7402	KAB MUNA	103.88
7403	KAB KONAWE	100.57
7404	KAB KOLAKA	105.50
7405	KAB KONAWE SELATAN	98.51
7406	KAB BOMBANA	102.88
7407	KAB WAKATOBI	113.60
7408	KAB KOLAKA UTARA	115.28
7409	KAB BUTON UTARA	115.59
7410	KAB KONAWE UTARA	108.14
7411	KAB KOLAKA TIMUR	109.33
7412	KAB KONAWE KEPULAUAN	128.31
7471	KOTA KENDARI	101.74
7472	KOTA BAU-BAU	108.34
7500	GORONTALO	
7501	KAB BOALEMO	106.24
7502	KAB GORONTALO	93.24
7503	KAB POHUWATO	101.95
7504	KAB BONE BOLANGO	93.25
7505	KAB GORONTALO UTARA	101.14
7571	KOTA GORONTALO	94.73
7600	SULAWESI BARAT	
7601	KAB MAJENE	101.82
7602	KAB POLEWALI MAMASA	82.93
7603	KAB MAMASA	113.94

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
7604	KAB MAMUJU	100.88
7605	KAB MAMUJU UTARA	97.26
7606	KAB MAMUJU TENGAH	102.95
8100	MALUKU	
8101	KAB MALUKU TENGGARA BARAT	129.20
8102	KAB MAKULU TENGGARA	121.80
8103	KAB MALUKU TENGAH	108.96
8104	KAB BURU	86.89
8105	KAB KEPULAUAN ARU	119.08
8106	KAB SERAM BAGIAN BARAT	102.20
8107	KAB SERAM BAGIAN TIMUR	111.39
8108	KAB MALUKU BARAT DAYA	156.21
8109	KAB BURU SELATAN	134.85
8171	KOTA AMBON	87.53
8172	KOTA TUAL	144.79
8200	MALUKU UTARA	
8201	KAB HALMAHERA BARAT	116.20
8202	KAB HALMAHERA TENGAH	136.09
8203	KAB KEPULAUAN SULA	138.85
8204	KAB HALMAHERA SELATAN	92.32
8205	KAB HALMAHERA UTARA	121.75
8206	KAB HALMAHERA TIMUR	119.28
8207	KAB PULAU MOROTAI	121.45
8208	KAB PULAU TALIABU	141.40
8271	KOTA TERNATE	126.94
8271	KOTA TIDORE KEPULAUAN	131.61

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
9100	PAPUA BARAT	
9101	KAB FAK-FAK	175.77
9102	KAB KAIMANA	151.52
9103	KAB TELUK WONDAMA	118.88
9104	KAB TELUK BINTUNI	147.42
9105	KAB MANOKWARI	116.60
9106	KAB SORONG SELATAN	126.09
9107	KAB SORONG	115.63
9108	KAB RAJA AMPAT	169.66
9109	KAB TAMBRAW	198.63
9110	KAB MAYBRAT	178.33
9111	KAB MANOKWARI SELATAN	138.21
9112	KAB PEGUNUNGAN ARFAK	199.63
9171	KOTA SORONG	113.99
9400	PAPUA	
9401	KAB MERAUKE	247.59
9402	KAB JAYAWIJAYA	254.25
9403	KAB JAYAPURA	144.52
9404	KAB NABIRE	164.59
9408	KAB YAPEN WAROPEN	158.31
9409	KAB BIAK NUMFOR	153.17
9410	KAB PANIAI	214.95
9411	KAB PUNCAK JAYA	413.38
9412	KAB MIMIKA	193.34
9413	KAB BOVEN DIGOEL	180.93
9414	KAB MAPPI	219.06
9415	KAB ASMAT	226.59
9416	KAB YAHUKIMO	197.53

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
9417	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	386.29
9418	KAB TOLIKARA	385.95
9419	KAB SARMI	242.60
9420	KAB KEEROM	176.76
9426	KAB WAROPEN	152.10
9427	KAB SUPIORI	185.87
9428	KAB MEMBERAMO RAYA	187.03
9429	KAB NDUGA	321.30
9430	KAB LANNY JAYA	357.07
9431	KAB MEMBERAMO TENGAH	399.62
9432	KAB YALIMO	388.65
9433	KAB PUNCAK	462.84
9434	KAB DOGIYAI	235.19
9435	KAB INTAN JAYA	431.26
9436	KAB DEIYAI	222.61
9471	KOTA JAYAPURA	172.80

DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://haltengkab.bps.go.id>



BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Poros Weda Payahe

email : bps8202@bps.go.id

homepage : haltengkab.bps.go.id